

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Al Marsudi, Subandi, 2012, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arfani, Riza Noer, 2001. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta.
- Astawa, I Gde Pantja, 2008, *Problemantika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Azhary, Tahir, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Beetham, David dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Kanisius, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiman, Arief, 1997, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiman, Hendra, 2015, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Budimansyah, Dasim dan Syaifullah, 2006, *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*, Laboratorium PKn UPI, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Review, Kuala Lumpur.

Cholisin, 2012, *Budaya Politik Indonesia dalam Pembelajaran PKn*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2013, *Ilmu Kewarganegaraan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Dahl, Robert A, 2001, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Darmodiharjo, Darji, *et al*, 1991, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya.

Effendi, Mahsyur, 1993, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Malang.

Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fauzan, Muhammad, *et al*, 2013, *Pemilukada (Rekontruksi Demokrasi Lokal dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta.

Gaffar, Afan, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

-----, 2006, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gaffar, Janedri M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Handoyo, Hestu Cipto, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Harahap, Abdul Asri, 2005, *Manajemen dan Resousi Konflik Pilkada*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Hazairin, 1983, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huntington, Samuel P, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Isjwara, F, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Penerbit Binacipta, Bandung.

Jatmika, Sidik, 2000, *AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Biografi Publishing, Yogyakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH.UII-Press, Yogyakarta.
- Joeniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Juliansyah, Elvi, 2007, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Koesnardi dan Hamaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mahfud, MD, Moh., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- , 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marijan, Kacung, 2007, *Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*, Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mubarok, M. Mufti, 2005, *Sukses Pilkada, Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*, Jaya Pustaka Media Utama, Surabaya.
- Mufti, Muslim dan Didah Darrotun Naafisah, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nadir, Ahmad, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

- Nurtjahjo, Hendra, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pamudji, S, 1982, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Bina Aksara, Jakarta.
- Purnama, Eddy, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Bandung.
- Rahman, Arifin, 2002, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya.
- Ranadireksa, Hendarmin, 2007, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokusmedia, Bandung.
- Rochamdi, Nur Wahyu, 2007, *Kewarganegaraan 2*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Heru, 2002, *Sari Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Perubahannya*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Sastrapratedja, M, 2010, *Konstitensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya*, PSP Press, Yogyakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sibuea, Hotma P., 2014, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sihombing, Frans Bona, 1984, *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-Nilai Politik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soedarsono, 2010, *MK Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Serjono dan Sri Pamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Sorensen, George, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Beubah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Strong, C.F, 2010, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

- Suharizal, 2003, *Gagasan Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Reformasi Hukum*, Fakultas Hukum Unand, Padang.
- Sumali, 2001, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, UMM Press, Malang.
- Thaib, Dahlan, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Tim CSIS, 1977, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Tjakrawerdaja, Subiakto, *et al.*, 2016, *Demokrasi Pancasila Sebuah Risalah*, Universitas Trilogi, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Zuhro, R.Siti, *et al.*, 2009, *Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*, Ombak, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XII/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/ 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Praditomo, Risqiawan Wisnu, 2016, *Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih*, Skripsi, Fakultas Hukum-UNS, Surakarta.

Sanusi, Tungki Rachman, 2016, *Implikasi Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dengan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Attamimi, A. Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV)*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana-UI, Jakarta.

Jurnal:

Rumesten, Iza, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret, 2016.

Wardani, Sri Budi Eko, “Calon Tunggal Gerakan Mundur Partai Politik”, *Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum*, Edisi IV, Juli-Agustus, 2015.

Widodo, Wahyu, “Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Ilmiah CIVIC*, Volume V, Nomor 1, Januari, 2015.

Yusdianto, “Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya”, *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2, November 2010.

Makalah:

Supriyanto, Didik, “Penataan Kembali Sistem Pemilihan dalam Pemilukada”, *Makalah*, pada Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada: antara Tori dan Praktek, Hotel Sultan Jakarta, 25-26 Januari, 2012.

Internet:

Affan, Heyder, “Polemik Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151204_indonesia_Pilkada_calontunggal, diakses 4 Maret 2017.

Firmanto, Danang, “9 Daerah Ini Hanya Punya Calon Tunggal dalam Pilkada 2017”, <https://Pilkada.tempo.co/read/news/2017/02/07/304844005/9-daerah-ini-hanya-punya-calon-tunggal-dalam-Pilkada-2017>, diakses 10 Februari 2017.

Hukum Online, “Akhirnya, Aturan Larangan Calon Tunggal Pilkada Digugat”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d4418dbb6d8/akhirnya--aturan-larangan-calon-tunggal-Pilkada-digugat>, diakses 6 Maret 2017.

JPNN.com, “Calon Tunggal di Pilkada Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih”, <http://www.jpnn.com/news/calon-tunggal-di-Pilkada-berpotensi-menurunkan-partisipasi-pemilih>, diakses 4 Maret 2017.

KPU.RI, “Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan”, <https://pilkada2017.kpu.go.id/paslon/tahapPenetapan>, diakses 25 Mei 2017.

Lismanto, “Gerakan Kotak Kosong Jadi Inspirasi Rancangan UU Pemilu”, <http://www.koranmuria.com/2017/02/17/54270/gerakan-kotak-kosong->

di-pati-jadi-inspirasi-rancangan-uu-pemilu.html, diakses 11 Maret 2017.

Nugraha, Candra, “Calon Tunggal Tasikmalaya Menang”, <https://Pilkada.tempo.co/read/news/2015/12/09/304726398/calon-tunggal-tasikmalaya-menang-kpud-belum-final>, diakses 4 Maret 2017.

Prasetya, Hendy, “Indonesia Negara Hukum yang Berketuhanan”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12240#.WTz3njelZdg>, diakses 22 Mei 2017.

Realita.co, “Ini Dampak Buruk Pilkada Calon Tunggal”, <http://www.realita.co/ini-dampak-buruk-Pilkada-calon-tunggal>, diakses 6 Maret 2017.

Riausatu.Com, “Kelemahan Putusan MK Calon Kepala Daerah Tunggal Bisa Ikut Pilkada”, <http://www.riausatu.com/read-2-8045-2015-10-01-kelemahan-putusan-mk-calon-kepala-daerah-tunggal-bisa-ikut-Pilkada.html>, diakses 6 Maret 2017.

Susilo, Tunggul, “Pasangan Pilkada Calon Tunggal Menang 84,90 Persen”, http://www.anbaktarajatim.com/berita/169741/pasangan-Pilkada-calon-tunggal-menang-8490-persen?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news, diakses 4 Maret 2017.

Tobing, Jakob, “Membenahi Pembentukan Perundang-undangan”, <http://www.leimena.org/id/page/v/138/membenahi-pembentukan-perundang-undangan-melalui-revisi-uu-no.-10-tahun-2004>, diakses 5 Juni 2017.

Triyoga, Hardani, “KPU: 7 Pilkada Ditunda Tahun 2017 Karena Calon Tunggal, Termasuk Surabaya”, <http://news.detik.com/berita/2982344/kpu-7-Pilkada-ditunda-tahun-2017-karena-calon-tunggal-termasuk-surabaya>, diakses 4 Maret 2017.

Wasono, Hari Tri, “Calon Tunggal Pilkada Blitar, KPU Dituding Tak Adil”, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/02/058715260/calon-tunggal-Pilkada-blitar-kpu-dituding-tak-adil>, diakses 4 Maret 2017.

Widodo, Bambang Eka Cahyo, “Calon Tunggal Dalam Pilkada”, <http://ip.ums.ac.id/2015/10/12/calon-tunggal-dalam-pemilukada/>, diakses 6 Maret 2017.